



**PEMERINTAH KOTA MALANG**

# **EVALUASI RENJA TAHUN 2023**

**Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
7. Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Malang.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Malang.
10. Badan adalah Badan Daerah Kota Malang.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada:

- a. RKPD Tahun 2023; dan
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

## BAB III

### SISTEMATIKA

#### Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 untuk masing-masing Perangkat Daerah tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. Penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- l. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
- o. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
- p. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- q. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- r. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- t. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;

- u. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- w. Rencana Kerja Kecamatan Klojen;
- x. Rencana Kerja Kecamatan Blimbing;
- y. Rencana Kerja Kecamatan Kedungkandang;
- z. Rencana Kerja Kecamatan Lowokwaru;
- aa. Rencana Kerja Kecamatan Sukun; dan
- bb. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### BAB IV

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi perubahan atas RKPD.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan/subkegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan/subkegiatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 Agustus 2022

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

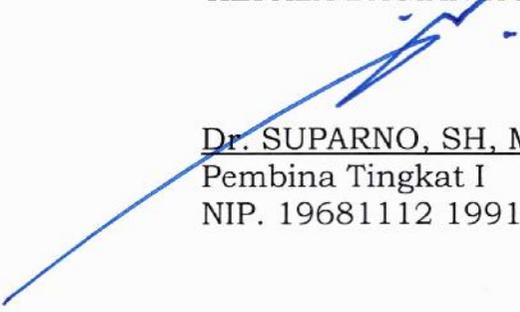
Diundangkan di Malang  
pada tanggal 4 Agustus 2022  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

MULYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang.

Renja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kota Malang dan merupakan bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
21. Peraturan Walikota Malang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
22. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang untuk menyelaraskan dan mensinkronkan tujuan serta sasaran program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2023 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara tahap dan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Tahun 2023 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

#### BAB.II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB.III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB. V PENUTUP

2/CA

## BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 merupakan Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Malang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker, PMPTSP) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dinas sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk mengevaluasi renja tahun lalu (n-2) tahun 2021 dilaksanakan sampai akhir triwulan 4 tahun 2021. Evaluasi hasil pengukuran kinerja untuk Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terhadap 9 program (meliputi 8 program pembangunan dan 1 program rutin) dan 17 kegiatan (meliputi 9 kegiatan pembangunan dan 8 kegiatan rutin) serta 33 sub kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penetapan Kinerja Tahun 2021 secara umum menunjukkan pencapaian kinerja yang baik terkait pelaksanaan pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Meski demikian ada 2 Kegiatan di bidang Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal yang tidak dilaksanakan karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan *covid* 19. Secara umum menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pula, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan digeser untuk kegiatan yang lain. Berikut Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

## 1. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun program/kegiatan/Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja keluaran pada renja yang direncanakan adalah :

## a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## 1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terealisasi sebesar 75% dari target pada renja sebesar 80% sehingga baru tercapai 94%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya terealisasi 62 stel dari target pada renja sebesar 70 stel sehingga baru tercapai 88,57%.

## 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub kegiatan yang belum tercapai adalah:

2.1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, untuk makan dan minum rapat terealisasi 4.404 kotak dari target di renja sebesar 4576 kotak sehingga baru tercapai 96,24%.

2.2) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD terealisasi 4367 berkas dari target renja sebesar 6100 berkas sehingga baru tercapai 71,59%.

## b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

## 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

## G.II-2

Kegiatan ini terealisasi sebesar 157 orang dari target pada renja 220 orang, sehingga baru tercapai 71,36% sebagaimana terinci dibawah ini :

1.1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi terealisasi 157 orang dari target di renja sebesar 220 orang sehingga baru tercapai 71,36%.

### c. Program Penempatan Kerja

1) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

Kegiatan ini terealisasi 0 lowongan dari target pada renja sebesar 0 lowongan sehingga baru tercapai 0%.

1.1) Job Fair/Bursa Kerja terealisasi 0 perusahaan dari target pada renja sebesar 0 perusahaan sehingga tercapai 0%.

### d. Program Hubungan Industrial

1) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terealisasi sebesar 22,73% dari target pada renja 65% sehingga baru tercapai 34,97%.

### e. Program Promosi Penanaman Modal.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini terealisasi 0 kali dari target pada renja sebesar 0 kali sehingga baru tercapai 0%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1.1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 0 kali dari target pada renja sebesar 0 kali sehingga baru tercapai 0%.

### f. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan yang belum tercapai adalah :

1.1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi 146 orang dari target di renja sebesar 216 orang sehingga baru tercapai 68%.

1.2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi 30 kali pengawasan dan 48 proyek (BAP Pengawasan) dari target di renja sebanyak 30 kali pengawasan dan 290 proyek BAP Pengawasan sehingga baru tercapai 58%.

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renja yang direncanakan adalah:

### a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terealisasi 100% dari target pada renja sebesar 100%, sub kegiatan yang telah terealisasi sesuai rencana adalah sebagai berikut:

1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi 2 dokumen dari target pada renja sebesar 2 dokumen.

- 1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi 10 dokumen dari target pada renja sebesar 10 dokumen.
- 1.3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 1 sertifikasi, 1 dokumen profil dan 2 dokumen standar pelayanan dari target pada renja sebesar 1 sertifikasi, 1 dokumen profil dan 2 dokumen standar pelayanan.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 2.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar 70 orang dari target pada renja sebesar 70 orang.
  - 2.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terealisasi sebesar 5 laporan dari target pada renja sebesar 5 laporan.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Kegiatan ini terealisasi sebesar 80% dari target pada renja sebesar 80%.
  - 3.1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD terealisasi sebesar 2 laporan dari target pada renja sebesar 2 laporan.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 4.1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi sebesar 98 orang dari target pada renja sebesar 98 orang.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Kegiatan ini sudah terealisasi 80% dari target renja 80%, sub kegiatan yang tercapai adalah:
  - 5.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi 10 jenis komponen dari target pada renja sebanyak 10 jenis komponen.
  - 5.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar 66 jenis dari target pada renja sebesar 66 jenis.
  - 5.3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi sebesar 2 jenis dari target pada renja sebesar 2 jenis.
  - 5.4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar 240 eksemplar dan 4 dokumen dari target pada renja sebesar 240 eksemplar bahan bacaan dan 4 dokumen perundang-undangan.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Kegiatan ini terealisasi sebesar 80% dari target renja sebesar 80%.
  - 6.1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi 5 jenis sarana prasarana dari target pada renja sebanyak 5 jenis sarana prasarana.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Kegiatan ini sudah terealisasi 80% dari target renja 80%.
  - 7.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar 12 bulan dari target pada renja sebesar 12 bulan
  - 7.2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi 750 m<sup>2</sup> dan 560 luasan ruangan yang dibersihkan serta 26 jenis alat kebersihan dari target pada renja sebanyak 750 dan 560 m<sup>2</sup> serta 26 jenis.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 8.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi sebesar 10700 liter dari target pada renja sebesar 10700 liter.
  - 8.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi sebesar 1 dokumen, 50 m2 dan 1 paket dari target pada renja sebesar 1 dokumen DED MPP, 50 m2 luasan gedung yang dipelihara dan 1 paket pemeliharaan MPP.
  - 8.3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi sebesar 6 jenis dari target pada renja sebesar 6 jenis.
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja.
- 1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1.1) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja terealisasi 50 orang dari target pada renja sebanyak 50 orang.
- c. Program Hubungan Industrial
- 1) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1.1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 1 dokumen, 1 dokumen dan 50 orang dari target pada renja sebesar 1 dokumen Rencana Tenaga Kerja, 1 dokumen usulan UMK dan 50 orang peserta pembinaan.
    - 1.2) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 6 dokumen dari target pada renja sebanyak 6 dokumen.
- d. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1.1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terealisasi 1 dokumen dari target pada renja sebanyak 1 dokumen.
    - 1.2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terealisasi 16 pelaku usaha dari target pada renja sebanyak 16 pelaku usaha.
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1.1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi 25 proyek dari target pada renja sebesar 25 proyek.
    - 1.2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi sebesar 30 kali dari target pada renja sebesar 30 kali pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal.
- g. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini terealisasi 70% dari target pada renja sebesar 70%.

- 1.1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik terealisasi 7 fitur dari target pada renja sebesar 7 fitur.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Adapun program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran pada renja yang direncanakan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Terdapat sub kegiatan yang tercapai melebihi rencana, yaitu :

- 1.1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi sebesar 91 kali dari target pada renja sebesar 68 kali.

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Terdapat sub kegiatan yang tercapai melebihi rencana, yaitu :

- 2.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi sebesar 45 unit kendaraan dari target pada renja sebesar 40 unit kendaraan.

- b. Program Pelayanan Penanaman Modal.

- 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini terealisasi sebesar sebanyak 16.970 izin terbit dari target pada renja sebanyak 10.000 izin.

- 1.1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik terealisasi sebesar 10.107 izin bidang Pekerjaan Umum dan 6863 izin Bidang Pariwisata, Sosial, Ekonomi dan Budaya dari target pada renja sebesar 5000 izin Pekerjaan Umum dan 5000 izin Bidang Pariwisata, Sosial, Ekonomi dan Budaya.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

- a. Masukan tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- 1.1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, pengadaan menyesuaikan Perwal Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Perwal 65 tahun 2015 tentang pakaian dinas Walikota, Wakil Walikota dan PNS, bahwa pengadaan pakaian khusus hanya diperuntukkan bagi petugas *front office* layanan.

- 1.2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.2.1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pengadaan mamin rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

*of/α*

- 1.2.2) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD belum tercapai karena tidak dapat memperkirakan banyaknya dokumen arsip yang masuk dalam setiap box.
  - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
    - 2.1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

Kegiatan ini merupakan anggaran yang bersumber dari DBHCHT sehingga pelaksanaannya menyesuaikan ketentuan DBHCHT yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 tahun 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT yang menyatakan bahwa pelatihan hanya boleh diberikan bagi pekerja/buruh pabrik rokok.

      - 2.1.1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi tidak tercapai karena banyak perusahaan rokok yang tidak mengizinkan pekerjanya untuk mengikuti pelatihan.
  - 3) Program Penempatan Tenaga Kerja.
    - 3.1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
      - 3.1.1) Job Fair/Bursa Kerja, sub kegiatan ini merupakan anggaran yang bersumber dari DBHCHT. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 tahun 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT bahwa dana DBHCHT hanya diperuntukkan kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi pekerja/buruh pabrik rokok.
  - 4) Program Promosi Penanaman Modal
    - 4.1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota belum terlaksana karena tidak ada pelaksanaan pameran investasi di tingkat provinsi dan anggaran dialihkan untuk penanganan *covid 19*.
      - 4.1.1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota belum terlaksana karena refocusing anggaran untuk penanganan *covid 19*.
  - 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
    - 5.1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
      - 5.1.1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, tidak tercapai karena juknis pelaksanaan kegiatan DAK tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
      - 5.1.2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, tidak tercapai karena juknis pelaksanaan kegiatan DAK tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Masukan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :
    - 1.1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini telah tercapai 100% dan semua sub kegiatan tercapai 100% terdiri dari :

- 1.1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah terealisasi 100% sesuai jadwal penyusunan renja dan renstra.
- 1.1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi 100% sesuai jadwal penyusunan laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 1.1.3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi 100% karena merupakan kegiatan harus dilaksanakan untuk menjamin manajemen mutu yang lebih baik.
- 1.2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 1.2.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi 100% sesuai banyaknya pegawai yang menerima gaji dan tunjangan.
  - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terealisasi 100% karena merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan perangkat daerah sebagai bentuk pertanggungjawab keuangan.
- 1.3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terealisasi 100% dari target renja.
  - 1.3.1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD terealisasi 100% karena merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan perangkat daerah.
- 1.4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 1.4.1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi 100% karena seluruh karyawan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan OPD.
- 1.5) Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi 100%.
  - 1.5.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi 100% karena penyediaan komponen listrik sesuai dengan kebutuhan.
  - 1.5.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi 100% karena pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan operasional dinas.
  - 1.5.3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi 100% karena pengadaan barang cetakan sesuai kebutuhan operasional dinas dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
  - 1.5.4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi 100% karena bahan bacaan sesuai kebutuhan dinas.
- 1.6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi 100%.
  - 1.6.1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi 100% karena pengadaan BMD sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKBMD.
- 1.7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 100%.
  - 1.7.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi 100% karena merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan untuk menunjang operasional kantor.

- 1.7.2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi 100% karena merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan untuk menunjang operasional kantor.
- 1.8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1.8.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi 100% karena pengadaan BBM, pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 1.8.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi 100% karena kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan kondisi gedung kantor dan pembangunan MPP .
- 1.8.3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi 100% karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kebutuhan sarana prasarana yang membutuhkan pemeliharaan.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja.
- 2.1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.1.1) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja terealisasi 100% karena seluruh pengurus BKK/alumni BKK yang diundang dapat menghadiri bimtek dan penyuluhan.
3. Program Hubungan Industrial
- 3.1) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
- 3.1.1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 100% karena seluruh peserta undangan dapat menghadiri bimtek dan penyusunan RTK dan rekomendasi usulan UMK dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 3.1.2) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 100% karena pelaksanaan rapat rutin LKS tripartite sesuai jadwal dan kebutuhan.
4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- 4.1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4.1.1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tercapai karena menyusun Naskah Akademik/Ranperda Pemberian Insentif Penanaman Modal.
- 4.1.2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tercapai karena pelaku usaha menghadiri evaluasi penanaman modal yang dilaksanakan perangkat daerah.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 5.1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- 5.1.1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi sesuai target dan jadwal pelaksanaan pemantauan ke perusahaan.
- 5.1.2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi sesuai target dan jadwal pengawasan pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan di Kota Malang.
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
  - 6.1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
    - 6.1.1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik terealisasi sesuai target karena pengembangan fitur dalam aplikasi izin online dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan peraturan terkait.
- c. Masukan penjelasan atas pencapaian yang melebihi target
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
      - 1.1.1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi melebihi target karena penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan kebutuhan serta adanya amanat untuk melakukan penjemputan kepada PMI yang pulang pada masa pandemi.
    - 1.2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
      - 1.2.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi melebihi target karena biaya pemeliharaan yang dianggarkan masih dapat digunakan untuk pemeliharaan kendaraan yang lain.
  2. Program Pelayanan Penanaman Modal.
    - 2.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
      - 2.1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, karena banyaknya permohonan izin yang masuk sehingga realisasi melebihi target yang ada di renja.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
  - a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Karena program ini didukung oleh anggaran yang bersumber dari DBHCHT dan adanya pembatasan sasaran pada peserta yang mengikuti pelatihan yaitu pada pekerja/buruh di perusahaan rokok maka target program Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum optimal untuk pengentasan pengangguran sehingga berpengaruh terhadap salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas

Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Dengan belum tercapainya beberapa target program Penempatan Tenaga Kerja karena adanya ketentuan baru terkait penggunaan DBHCHT dan kondisi pandemi *Covid 19* berpengaruh terhadap peningkatan pengangguran terbuka dan kesempatan pencari kerja mendapat pekerjaan pada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dan yang menjadi salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

c. Program Hubungan Industrial.

Dengan tercapainya target kinerja program Hubungan Industrial maka pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpengaruh terhadap penyelesaian kasus perselisihan hubungan perusahaan dan tenaga kerja dan menjadi salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

d. Program Promosi Penanaman Modal

Dengan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan *covid 19* maka tidak tercapainya target kinerja program Promosi Penanaman Modal pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurang optimal, sehingga berpengaruh terhadap minat investor yang ada di Kota Malang.

e. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Dengan tercapainya target program Pengembangan Iklim Penanaman Modal maka pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berjalan dengan optimal, sehingga berpengaruh terhadap nilai kenaikan Penanaman Modal dan Investasi Daerah yang menjadi salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Dengan tercapainya target program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi maka pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang khususnya terkait Data dan Sistem Informasi ketenagakerjaan, penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berpengaruh terhadap salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

g. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Dengan tercapainya melebihi target program Pelayanan Penanaman Modal maka pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berjalan dengan optimal, sehingga berpengaruh terhadap nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

h. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dengan tercapainya beberapa target program Pengendalian Penanaman Modal maka diharapkan pada semester 4 semua target dapat terpenuhi karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaku usaha yang ada di Kota Malang dan menjadi salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan tercapainya target program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berjalan dengan optimal, sehingga berpengaruh terhadap nilai SAKIP yang menjadi salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, maka pada tahun 2023 perlu dilakukan:

- a. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta usulan masyarakat dalam musrenbang;
- b. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan Pembinaan bagi Bursa Kerja Khusus, Perusahaan pengerah jasa pekerja dan pencari kerja untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja dan *Job Market Fair* melalui media *online* sebagai solusi pada masa pandemi dalam pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- c. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan Pembinaan bagi pekerja dan pengusaha terkait Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan, kelembagaan ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja guna membangun kondisi hubungan industrial yang harmonis;
- d. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kinerja ASN yang mendukung capaian program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan penyusunan *database* ketenagakerjaan, penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Merencanakan dan menganggarkan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan yang terintegrasi;
- g. Merencanakan dan menganggarkan program nasional dalam kemudahan perizinan berusaha melalui kegiatan pelaksanaan *Online Single Submission RBA*;
- h. Merencanakan dan menganggarkan Sarana dan Prasarana Mall Pelayanan Publik (MPP) secara bertahap sesuai kebutuhan;
- i. Merencanakan dan menganggarkan regulasi peraturan dan kebijakan terkait Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja;

- j. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan dengan teliti agar dapat mendukung capaian program pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Semua pejabat struktural atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengevaluasi kembali kegiatannya baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan apakah kegiatan tersebut keluarannya atau hasilnya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan memberikan manfaat. Sehingga dapat diusulkan kembali untuk renja tahun selanjutnya yang sifatnya berkesinambungan serta pada akhir rencana strategis lima tahunan target bisa terpenuhi dan tepat sasaran.
- l. Semua pejabat struktural atau Pejabat Teknis Kegiatan harus melaksanakan program kegiatan yang telah diusulkan sesuai perencanaan sehingga program kegiatan dapat terealisasi sesuai target kinerja keluaran/hasil.
- m. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun yang akan datang karena terdapat banyak penambahan kebutuhan sebagai konsekuensi pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 bisa dilihat pada tabel T-C.29.

## G.II-13

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
s/d Tahun 2021 Kota Malang

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 =10/4
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.07	Bidang Urusan Tenaga Kerja									
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		100%	100%	100%	44,44%	144,44%	144,44%
		- Nilai Survey Kepuasan Internal	80		80	95,94	119,93%	0	95,94	119,93%
		- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%		80%	90,70%	113,37%	0	90,70%	113,37%
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%		100%	100%	100%	52,94%	152,94%	152,94%
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Renja/RKT	7 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	4 dokumen	57,14%
		- Jumlah dokumen Renstra	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	3 dokumen	75,00%

10/6

## G.II-14

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja dan ikhtisar realisasi	33 dokumen	12 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	7 dokumen	29 dokumen	87,88%
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen standar pelayanan	12 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	10 dokumen	83,33%
		- Jumlah profil perangkat daerah	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	1 dokumen	25,00%
		- Jumlah sertifikasi	5 sertikasi	2 sertifikasi	1 sertifikasi	1 sertifikasi	100%	0	3 sertifikasi	60,00%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%		80%	100%	125%	36,84%	136,84%	100,00%
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah ASN	206 orang	67 orang	70 orang	70 orang	100%	65 orang	202 orang	98,06%
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah laporan keuangan	32 laporan	12 dokumen	5 laporan	5 laporan	100%	0	17 laporan	53,13%
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	80%		80%	80%	100%	0	80%	100,00%
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	10 laporan	3 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%	0	5 laporan	50,00%
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%		80%	75%	94%	0	75%	75,00%
2.07.01.2.05.0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	311 stel	80 stel	70 stel	62 stel	88,57%	0	142 stel	45,66%

apc

## G.II-15

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	331 orang	159 orang	98 orang	98 orang	100%	65 orang	322 orang	97,28%
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80%		80%	80%	100%	0	80%	100,00%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	44 jenis	19 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	5 jenis	34 jenis	77,27%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah alat tulis kantor	346 jenis	211 jenis	66 jenis	66 jenis	100%	34 jenis	311 jenis	89,88%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan	123 jenis	81 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	10 jenis	93 jenis	75,61%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan	970 eks	130 eks	240 eks	240 eks	100%	149 eks	519 eks	53,51%
		- Jumlah perundang-undangan	14 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	2 dokumen	10 dokumen	71,43%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah makanan dan minuman	21.069 kotak	4.824 kotak	4.576 kotak	4.404 kotak	96,24%	1541 kotak	10.769 kotak	51,11%
		- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	185 kali	30 kali	68 kali	91 kali	134%	41 kali	162 kali	87,57%
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah bahan pustaka	20460 berkas	7.533 berkas	6.100 berkas	4.367 berkas	71,59%	0	11.900 berkas	58,16%

## G.II-16

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%		80%	80%	100%	0	80%	80,00%
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	30 jenis	7 paket	5 jenis	5 jenis	100%	7 jenis	19 jenis	63,33%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%		80%	80%	100%	0	80%	80,00%
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon,air dan listrik	63 bulan	27 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	6 bulan	45 bulan	71,43%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Luasan ruangan yang dibersihkan	17.650 m <sup>2</sup>	3.950 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	100%	750 m <sup>2</sup>	5450 m <sup>2</sup>	30,88%
		- Luasan ruangan yang dibersihkan			560 m <sup>2</sup>	560 m <sup>2</sup>	100%	5600 m <sup>2</sup>	6160 m <sup>2</sup>	
		- Jumlah bahan dan alat			26 jenis	26 jenis	100%	17 jenis	43 jenis	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%		80%	90%	113%	0	90%	112,50%
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	206 unit	81 kendaraan	40 unit	45 unit	113%	20 unit	146 unit	70,87%
		- Jumlah volume BBM dan pelumas	52.984 liter	8.184 liter	10.700 liter	10.700 liter	100%	9.112 liter	27996 liter	52,84%



## G.II-17

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah dokumen revisi DED MPP	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	0	1 dokumen	100,00%
		- Luasan gedung kantor yang dipelihara	1.877 m2	750 m2	50 m2	50 m2	100%	0	800 m2	42,62%
		- Rehabilitasi MPP	3 paket		1 paket	1 paket	100%	0	1 paket	33,33%
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	91 jenis	62 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	3 jenis	71 jenis	78,02%
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)					100%			53%
		Predikat Kinerja					Sangat tinggi			Sangat Rendah
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	- Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1%	0%	1%	0,49%	48,57%	0	0,49%	48,57%
		Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	70%		60%	71,36%	118,94%	0	71,36%	101,95%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pengangguran yang dilatih	923 orang	335 orang	220 orang	157 orang	71,36%	0	335 Orang	36,29%
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	923 orang	335 orang	220 orang	157 orang	71,36%	96 orang	588 orang	63,71%
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)					71,36%			53,30%

Handwritten signature or initials.

## G.II-18

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
			Predikat Kinerja					Sedang			Sangat Rendah
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	- Persentase pencari kerja yang ditempatkan	78%		76%	56,25%	74,01%	0	56%	72,12%	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	34 BKK		32 BKK	34 BKK	106%		34 BKK	100,00%	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	- Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus	200 orang	200 orang	50 orang	50 orang	100%	80	330 orang	165,00%	
2.07.04.2.02	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab/kota	976 lowongan	lowongan	lowongan	0 lowongan	0%		0 lowongan	0,00%	
2.07.04.2.02.01	Job Fair/Bursa Kerja	- Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair	275 perusahaan	60 perusahaan	0 perusahaan	0 perusahaan	0%	35	95 perusahaan	34,55%	
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)					100%			125%
			Predikat Kinerja					Sangat tinggi			Sangat tinggi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	- Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11,3%		5,12%	6,18%%	120,76%	0	6,18%	54,72%	
2.07.05.0.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	70 %		65%	22,73%	34,97%	0	34,97%	0,50%	

Handwritten signature or initials.

G.II-19

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2.07.05.0.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen rencana tenaga kerja daerah	2 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	1 dokumen	50,00%
		- Jumlah dokumen usulan UMK	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	3 dokumen	100,00%
		- Jumlah peserta pembinaan tentang pemahaman dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial	250 orang	250 orang	50 orang	50 orang	100%	0	300 orang	120,00%
2.07.05.0.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen hasil LKS Tripartit	21 dokumen	10 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	0	16 dokumen	76,19%
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)						100,00%		86,55%
		Predikat Kinerja						Sangat tinggi		Tinggi
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	- Persentase realisasi penanaman modal	80%		70%	43,44%	62,06%	0	43,44%	54,30%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	9 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	0	3 dokumen	33,33%

ap  
ct

## G.II-20

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	- Jumlah Ranperda / Ranperwal yang disusun	9 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	6 dokumen	66,67%	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	- Jumlah pelaku usaha	21 pelaku usaha	20 pelaku usaha	16 pelaku usaha	16 pelaku usaha	100%	0	36 pelaku usaha	171,43%	
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)					100%			119%
			Predikat Kinerja					Sangat tinggi			Sangat tinggi
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	60%		40%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0%	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	7 kali	3 kali	0 kali	0 kali	0%	0	3 kali	43%	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	- Keikutsertaan dalam gelar pameran investasi	7 kali	3 kali	0 kali	0 kali	0%	0	3 kali	43%	
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)					0%			43%
			Predikat Kinerja					Sangat Rendah			Sangat Rendah

  
 G

## G.II-21

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	- Persentase Penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum	90%		85%	92,68%	109,04%		92,68%	102,98%
		- Persentase Penerbitan ijin dan non ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	90%		85%	92,56%	108,89%		92,56%	102,84%
		- Persentase realisasi target retribusi IMB	100%		100%	81,91%	81,91%		81,91%	81,91%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum sesuai standar	18.200 Izin	16995 Izin	5.000 Izin	10.107 Izin	202%	3706 izin	30808 Izin	169,27%
		- Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan Ekaonomi, pariwisata dan sosial budaya sesuai standar	15.200	5132 Izin	5.000 Izin	6.863 Izin	137%	4316 izin	16311 Izin	107,31%
		- Persentase IMB yang terbit	80%		70%	83,57%	119%		83,57%	104,46%
		- Persentase pengaduan yang diselesaikan	100%		100%	100%	100%		100%	100,00%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis	- Jumlah Perizinan nonperizinan pekerjaan umum yang diterbitkan	18200 izin	16.995 izin	5.000 izin	10.107 izin	202%	3706 izin	30808 Izin	169,27%



## G.II-22

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
	sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Jumlah perizinan dan Non Perizinan Ekparsosbud yang diterbitkan	15200 izin	5.132 izin	5.000 izin	6.863 izin	137%	4316 izin	16311 Izin	107,31%	
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)						169,70%			113,91%
		Predikat Kinerja						Sangat tinggi			Sangat tinggi
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80%		70%	70%	100%	0	70%	88%	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	69 perusahaan	3 perusahaan	23 perusahaan	25 perusahaan	109%	0	28 perusahaan	41%	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Profil hasil pemantauan LKPM	75 proyek	0	25 proyek	25 proyek	100%	0	25 proyek	33%	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah peserta bimbingan teknis/ sosialisasi	2.048 orang	1.381 orang	216 orang	146 orang	68%	0	1.527 orang	75%	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penanaman modal	80 kali	13 kali	30 kali	30 kali	100%	5	48 kali	60%	

Handwritten signature or initials.

## G.II-23

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
		- Profil hasil Pengawasan dan BAP	610 proyek		290 proyek	48 proyek	17%	5	53 proyek	8,69%	
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)						71,04%			42,38%
		Predikat Kinerja						Sedang			Sangat Rendah
		-									
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	- Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100%		80%	80%	100%	0	80%	80,00%	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	80%		70%	70%	100%	0	70%	87,50%	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Jumlah fitur	21 fitur		7 fitur	7 fitur	100%	0	7 fitur	33,33%	
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)						100%			33%
		Predikat Kinerja						Sangat tinggi			Sangat Rendah

10/10

## G.II-24

Kode.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)					90,24%			74,41%
			Predikat Kinerja					Tinggi			Sedang

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan.

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam proses evaluasi kinerja dengan tujuan akhir yang hendak dicapai yaitu melaksanakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan program yang dilaksanakan suatu lembaga layanan publik.

Pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah :

- a. Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2020 terealisasi sebesar 64,36 dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 43,58 dari target 67,00
- b. Persentase peningkatan nilai investasi daerah terealisasi sebesar -76,17% pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 126,12% dari target sebesar 3,8%.
- c. Rasio penduduk yang bekerja terealisasi sebesar 90,39% pada tahun 2020 dan ada tahun 2021 realisasi 90,35% dari target 93,80%
- d. Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik mencapai 2,67 pada tahun 2020 dan capaian tahun 2021 terealisasi 3,67 dari target 3,5.
- e. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan terealisasi sebesar 85,09 pada tahun 2020 dan sebesar 95,94 tahun 2021 dari target sebesar 88,75.
- f. Nilai SAKIP pada tahun 2020 sebesar 82,76 sedangkan tahun 2021 evaluasi SAKIP 84,60, sehingga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

## G.II-26

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Rasio daya serap tenaga kerja	√		63,91	65,00	67,00	70,00	73,00	64,36	43,58	70,00	70,00	Permendagri 86 Tahun 2017
2.	Persentase peningkatan nilai investasi daerah		√	3,60%	3,70%	3,80%	3,90%	4,00%	-76,17%	126,12%	3,90%	3,90%	IKK Outcome
3.	Rasio penduduk yang bekerja	√		93,21%	93,50%	93,80%	94,10%	94,40%	90,39%	90,35%	94,10%	94,10%	Permendagri 86 Tahun 2017
4.	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik			2,60	3,00	3,50	3,80	4,50	2,67	3,67	3,80	3,80	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan			85,00	88,50	88,75	89,00	89,50	85,09	95,94	89,00	89,00	
6.	Nilai SAKIP			80,00	80,10	80,20	80,30	80,40	82,76	84,60	80,30	80,30	

not

### 2.3. Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

#### 1. Tingkat kinerja pelayanan

Pelayanan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk di telusuri perkembangannya mengingat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berlakunya undang-undang tersebut mengakibatkan interaksi antara aparat daerah dan masyarakat menjadi lebih intens. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas. Peran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam pelayanan publik mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat sebagai penyedia pelayanan. Pelayanan perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi Daerah. Kewenangan untuk memungut retribusi serta penerbitan izin menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun untuk mencegah terjadinya pungutan retribusi yang berlebihan serta perizinan yang menghambat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam rangka menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif di daerah, maka penting dan perlunya pengembangan kinerja birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang kompetitif seiring dengan perubahan trend globalisasi. Tetapi upaya kearah tersebut masih banyak mengalami permasalahan serius. Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang masih dihadapkan dengan berbagai realita dimana potret penyelenggara pelayanan masih dirasakan belum optimal dan belum memperlihatkan pelayanan prima yang diharapkan. Tingkat kinerja pelayanan perizinan dapat dikatakan berhasil apabila semua jenis layanan dapat memuaskan masyarakat, dimana semua pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Pelayanan, Standar Pelayanan serta berkomitmen terhadap SMM ISO dan Zona Integritas yang sudah ada pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

#### 2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Terus bertambahnya jumlah angkatan kerja, di satu sisi lapangan kerja yang tersedia tidak memadai menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka.
- b. Meningkatnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial dan pengurangan pegawai pada beberapa industri menyebabkan pengangguran bertambah.
- c. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berakibat rendahnya daya saing yang menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja.
- d. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan, perizinan, penanaman modal yang akurat, lengkap dan berkesinambungan serta mudah diakses oleh publik melalui sistem informasi/aplikasi.

- e. Terjadinya pandemi *covid 19* menyebabkan penurunan PAD Kota Malang terutama kontribusi retribusi IMB dan tingkat ekonomi yang berdampak pada menurunnya penyerapan tenaga kerja serta pemutusan hubungan kerja pada sektor-sektor terdampak *covid 19*.
3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional
- Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
  - Masih adanya anggapan masyarakat terhadap proses perizinan yang berbelit-belit.
  - Rendahnya tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan.
  - Pertumbuhan investasi di Kota Malang belum maksimal.
4. Tantangan dan Peluang Dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah  
Sebagai wilayah perkotaan Kota Malang mempunyai peluang usaha yang besar dalam bidang pendidikan dan pariwisata, disisi lain dengan adanya arus global yang sangat besar masuk ke Indonesia berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Beberapa peluang yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :
- Pelayanan dengan menggunakan Teknologi Informasi yang dengan mudah diakses masyarakat dalam perizinan *online*.
  - Transparansi biaya dalam pengurusan perizinan.
  - Pelayanan perizinan keliling yang memudahkan masyarakat mengurus izin.
  - Pelayanan terpadu satu pintu.
5. Isu Strategis  
Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :
- Masih tingginya angka pengangguran, yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja disektor formal serta pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja;
  - Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pencari kerja;
  - Kurang relevansinya program pelatihan kerja dengan kebutuhan industri sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan industri dengan kompetensi angkatan kerja;
  - Belum optimalnya kondisi ketenagakerjaan, ditandai oleh hubungan industrial yang masih rentan akibat kurang harmonisnya hubungan antara pengusaha dan pekerja akibat perubahan berbagai peraturan;
  - Terbatasnya perlindungan tenaga kerja yang ditandai dengan masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan.
  - Kemudahan dalam pengurusan perizinan baik izin usaha dan penanaman modal. Selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi melalui berbagai kebijakan perizinan berusaha, dimana kemudahan berusaha berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk melakukan investasi di Kota Malang.
  - Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
    - Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ditambahkan kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan dari

56 Izin menjadi 126 perizinan dan Non Perizinan perlu didukung Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai.

2. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission* berbasis resiko sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

#### h. Iklim Investasi

Kota Malang sebagai Kota yang berkembang pesat memiliki potensi investasi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan mempunyai nilai jual yang strategis untuk meningkatkan sektor perekonomian berbasis ekonomi kreatif, melalui :

1. Optimalisasi pemetaan potensi investasi
2. Optimalisasi promosi dan fasilitasi di bidang investasi
3. Optimalisasi layanan perizinan dan non perizinan
4. Optimalisasi data ketenagakerjaan, perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.

#### i. Kualitas Pelayanan Publik

Disnaker, PMPTSP berusaha mewujudkan kualitas pelayanan yang berfokus pada masyarakat, yang diimplementasikan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta Sistem Layanan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Untuk mewujudkan layanan yang berkualitas harus didukung dengan :

1. Tersedianya Standar Pelayanan, SOP dan *Website* Disnaker, PMPTSP
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang menangani layanan perizinan dan non perizinan
3. Optimalisasi Informasi terkait peta potensi penanaman modal yang dimiliki Disnaker, PMPTSP.
4. Peran serta masyarakat dalam menyusun Standar Pelayanan.
5. Tersedianya layanan pengaduan yang memadai.
6. Layanan OSS yang maksimal.

#### 2.4. Review terhadap RKPD

1. Dari Rencana Kerja yang telah disusun pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang telah disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dinas. Rencana kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Malang. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran strategis, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sesuai hasil analisis kebutuhan terhadap program kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Bidang Tenaga Kerja melaksanakan 3 (tiga) program, Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal melaksanakan 2 (dua) program, Bidang Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya dan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum melaksanakan 1 (satu) program, Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi melaksanakan 2 (dua) program serta Sekretariat melaksanakan 1 (satu) program, dengan jumlah keseluruhan sub kegiatan sebanyak 40 sub kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 30.081.697.649,-. Namun demikian, pagu anggaran yang ditetapkan untuk Disnaker, PMPTSP sebesar Rp.21.821.697.649,- (Dua puluh satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribenam seratus empat puluh sembilan rupiah).

- a. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 1.811.850.000,- menjadi Rp. 1.811.850.000,- pada RKPD.
  - b. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 52.210.000,- menjadi Rp. 52.210.000,- pada RKPD.
  - c. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Hubungan Industrial sebesar Rp.246.850.100,- menjadi Rp. 246.850.000,- pada RKPD.
  - d. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp.8.990.000,- menjadi Rp. 8.990.000,- pada RKPD.
  - e. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp.48.990.000,- menjadi Rp. 48.990.000,- pada RKPD.
  - f. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp. 964.039.776,- menjadi Rp. 964.039.776,- pada RKPD.
  - g. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Pengendalian Penanaman Modal sebesar Rp. 146.555.000,- menjadi Rp. 146.555.000,- pada RKPD.
  - h. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp. 177.680.558,- menjadi Rp.177.680.558,- pada RKPD.
  - i. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 26,624,532,215,- menjadi Rp.18,364,532,215,- pada RKPD.
2. Dengan adanya analisis kebutuhan ini diharapkan mampu mencapai target kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Dimana ada beberapa kegiatan yang sifatnya rutin dan menunjang operasional pelayanan yang kurang memadai.
  3. Dari RKPD tidak ditemukan perbedaan untuk program, namun kegiatan dan penganggaran masih belum sesuai dengan hasil analisis kebutuhan sehingga perlu pertimbangan.
  4. Reviu terhadap RKPD tahun 2023 disajikan dalam tabel T-C.31

G.II-31

Tabel T-C.31

REVIU TERHADAP RKPD TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22,821,697,649	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30,081,697,649	
	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA				21,475,442,315	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA			28,735,442,315	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,364,532,215				26,624,532,215	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	11,192,850,526	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	10,192,850,526	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	116,420,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	116,420,000	



## G.II-32

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	12,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	12,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 laporan	10,000,000	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	94,420,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	94,420,000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	11,076,430,526	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	10,076,430,526	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	72 Orang/Bulan	11,048,235,526	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	72 Orang/Bulan	10,048,235,526	

10/04

## G.II-33

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	28,195,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	28,195,000	
			Nilai Survey Kepuasan Internal	80	1,946,827,581		Nilai Survey Kepuasan Internal	80	3,706,827,581	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	197,700,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	197,700,000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Malang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 orang	197,700,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 orang	197,700,000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80%	643,954,960	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80%	783,954,960	

## G.II-34

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	25,892,540	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	65,892,540	Penunjang sarana MPP
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	196,839,520	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	196,839,520	
			Jumlah alat tulis kantor	0						
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Malang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	196,812,900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	196,812,900	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 dokumen	8,590,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 dokumen	8,590,000	
							Jumlah peraturan perundang- undangan	2 dokumen	-	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 laporan	211,220,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 laporan	311,220,000	Penjemput an PMI dan Koordinasi

## G.II-35

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Jumlah makanan dan minuman	0	-	
							Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	26 kali		
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	4,600,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	4,600,000	
			jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	0						
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	1,105,172,621	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	2,725,172,621	
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	576,139,760	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	2,076,139,760	Pemisahan pembayaran tarif listrik MPP agar tidak memakai beban dengan kategori bisnis

## G.II-36

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	529,032,861	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	649,032,861	Sewa tanaman hias untuk MPP
							Luasan ruangan yang dibersihkan	5600 m2		
							Jumlah bahan dan alat	17 jenis		
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	6,224,854,108		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	12,724,854,108	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	80%	3,275,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	80%	3,275,000	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	3,275,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	3,275,000	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	275,732,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	1,775,732,000	
1.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	275,732,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	1,775,732,000	Penunjang sarana MPP

## G.II-37

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%	5,945,847,108	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%	10,945,847,108	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	558,523,024	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	558,523,024	
							Jumlah volume BBM dan pelumas	22400 liter		
1.8.2	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	1 unit	5,340,772,084	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	1 unit	10,340,772,084	Rehabilita si tahap 3 MPP
							Rehabilitasi MPP	1 paket		
							Jumlah dokumen revisi DED MPP			
1.8.3	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	124 unit	46,552,000	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	124 unit	46,552,000	

Handwritten signature or initials.

## G.II-38

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1%	1,722,280,000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1%	1,722,280,000	
2.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pengangguran yang dilatih	103 orang	1,722,280,000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pengangguran yang dilatih	257 orang	1,722,280,000	
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Malang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	103 orang	1,722,280,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	103 orang	1,722,280,000	
			Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	70%	89,570,000		Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	70%	89,570,000	
2.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPK yang memiliki perizinan	35 Lembaga	89,570,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang memiliki perizinan	35 LPKS	89,570,000	
2.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Malang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	35 Lembaga	89,570,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	35 Lembaga	89,570,000	
					-					
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	78%	52,210,000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	78%	52,210,000	

## G.II-39

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	34 BKK	52,210,000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	34 BKK	52,210,000	
3.1.1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Malang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 orang	52,210,000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 orang	52,210,000	
					-					
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11.3%	246,850,100	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11.30%	246,850,100	
4.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	70%	246,850,100	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	70%	246,850,100	

## G.II-40

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	24 perkara	93,850,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	24 perkara	93,850,000	
							Jumlah peserta pembinaan	100 orang		
							Jumlah dokumen Usulan UMK	1 dokumen		
							Jumlah peserta sosialisasi	100 orang		
4.1.3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	153,000,100	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	153,000,100	
	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL				1,346,255,334	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL			1,346,255,334	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Realisasi Penanaman Modal	80%	8,990,000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Penanaman Modal	80%	8,990,000	

10/16

## G.II-41

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	1 dokumen	8,990,000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	1 dokumen	8,990,000	
5.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Malang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	8,990,000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	8,990,000	
6	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan jumlah minat investor	60%	48,990,000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	60%	48,990,000	
6.1	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 kali	48,990,000	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 kali	48,990,000	
6.1.1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	48,990,000	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	48,990,000	
			Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	0			Jumlah keikutsertaan dalam gelar pameran investasi			

ofc

## G.II-42

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penerbitan ijin dan non ijin Pekerjaan Umum  Persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya Persentase realisasi target retribusi IMB	90%  90%  100%	964,039,776	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan ijin dan non ijin Pekerjaan Umum  Persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya Persentase realisasi target retribusi IMB	90%  90%  100%	964,039,776	
7.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum Sesuai Standar	5000 Izin	964,039,776	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum Sesuai Standar	5000 izin	964,039,776	
			Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Sesuai Standar  Persentase IMB yang terbit Persentase pengaduan yang diselesaikan	6000 Izin  80%  100%			Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Sesuai Standar  Persentase IMB yang terbit Persentase pengaduan yang diselesaikan	6000 izin  80%  100%		

## G.II-43

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Malang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11000 pelaku usaha	959,899,776	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11000 pelaku usaha	959,899,776	
7.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Malang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 kegiatan usaha	2,070,000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 kegiatan usaha	2,070,000	
7.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Malang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 orang	2,070,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 orang	2,070,000	



## G.II-44

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80%	146,555,000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80%	146,555,000	
8.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	23 perusahaan	146,555,000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	23 perusahaan	146,555,000	
8.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Kota Malang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 kegiatan usaha	4,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 kegiatan usaha	4,000,000	
8.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Malang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	140 pelaku usaha	96,555,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	140 pelaku usaha	96,555,000	
8.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Malang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	140 kegiatan usaha	46,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	140 kegiatan usaha	46,000,000	

## G.II-45

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal	10 kali		-
9	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100%	177,680,558	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100%	177,680,558	
9.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	80%	177,680,558	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	80%	177,680,558	
9.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Malang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	177,680,558	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	177,680,558	
			Jumlah fitur	0			Jumlah fitur	7 fitur		

## G.II-46

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah data yang diolah	0			Jumlah data yang diolah	20000 data		

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada rancangan renja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang telah mengakomodir paket usulan kegiatan dari musrenbang kelurahan/kecamatan dan musrenbang tematik serta hasil akomodir pokir. Usulan kegiatan tersebut terkait urusan ketenagakerjaan sebagaimana telah diusulkan pada kamus usulan kegiatan musrenbang tahun 2023. Adapun usulan kegiatan yang diakomodir adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, mengakomodir 34 usulan kegiatan musrenbang kecamatan, 22 usulan musrenbang tematik dan 23 usulan pokir. Jumlah peserta pada masing-masing jenis pelatihan adalah Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal sebanyak 24 orang untuk musrenbang dan 45 orang untuk pokir, Pelatihan digital marketing sebanyak 33 orang untuk musrenbang dan 92 orang untuk pokir, Pelatihan olahan pangan (Pastry/ Bakery dan Aneka Masakan) sebanyak 26 Orang untuk musrenbang dan 99 orang untuk pokir, serta Pelatihan Barista sebanyak 20 orang untuk musrenbang dan 65 orang untuk pokir dengan total anggaran sebesar Rp.440.500.000,- untuk musrenbang dan Rp.1.272.500.000,- untuk pokir. Usulan musrenbang dan pokir tersebut terakomodir pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dalam RKKPD tahun 2022 disajikan dalam tabel T-C.32. :

G.II-48

T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kota Malang

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indika tor Kinerj a	Besaran/Volume			Catatan	
					Volu me	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)		Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
USULAN MUSRENBANG									
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
1	Pelatihan barista	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Batubara No.3, Kota Malang		4 orang		4,000,000	16,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan barista		Jl. Sultan Agung Utara No. 7 Malang (Forum Osis Malang), Kota Malang		2 orang		4,000,000	8,000,000	Usulan musrenbang Tematik
3	Pelatihan barista		Jl. Ki Ageng Gribig No.1 Rt. 7 Rw.3 (GARDA BANGSA), Kota Malang		2 orang		4,000,000	8,000,000	Usulan musrenbang Tematik
4	Pelatihan barista		PELATIHAN BARISTA JALAN PROF MOH YAMIN RT 07 RW 06, Kota Malang		3 orang		4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
5	Pelatihan barista		Aula Kel. Penanggungungan Jl. Ters. Cikampek 147 Malang, Kota Malang		3 orang		4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan

## G.II-49

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume			Catatan	
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pelatihan barista		Kelurahan Bakalankrajan, Kota Malang		3	orang	4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
7	Pelatihan barista		PEMUDA, Kota Malang		3	orang	4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
8	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Kel. Sukun, Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Kelurahan
9	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Sultan Agung Utara No. 7 Malang (Forum Osis Malang), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
10	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Teluk Pelabuhan Ratu; Karang Taruna RW01, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
11	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Atletik 125 bkm2 Tasikmadu, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
12	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Gajayana Gg.5 no. 583 (Titik Terang), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
13	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Supriadi no 24 Kec. Sukun Kota Malang (GMNI), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
14	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Kantor Kelurahan Tulusrejo Jl Bantaran Barat II no 2, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
15	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Galunggung 05, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
16	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan

## G.II-50

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume			Catatan	
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)		Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Wisnuwardhana Gg. Air Das No. 1 Telp. 081233560009 Malang 65139 (pemuda demokrat), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
18	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Mayjend Panjaitan No. 164, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. (PMII), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
19	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Gajayana no 28 B ( Pemuda Muhammadiyah ), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
20	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Ki Ageng Gribig RW 1, Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Kelurahan
21	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl.S.Supriadi No.15, Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Kelurahan
22	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Karang Taruna - Kelurahan Kesatrian, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
23	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Gedung SerbagunaKelurahaDinoyo, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
24	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Anggur No. 1 Kelurahan Pisangcandi, Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Kelurahan
25	Pelatihan digital marketing		Jalan Raya Sawojajar No. 45, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
26	Pelatihan digital marketing		Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119 (ansor), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik

## G.II-51

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indika tor Kinerj a	Besaran/Volume			Catatan	
					Volu me	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)		Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Pelatihan digital marketing		Perum Pesona Sigura Gura Kav. 12, Merjosari, Lowokwaru Malang (Gema Keadilan), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
28	Pelatihan digital marketing		Jl. SoekarnoHatta Kav, 3, 5, dan 7 Malang, Jawa timur (Hikmahbudhi), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
29	Pelatihan digital marketing		Jl. Gajayana 28 B (IPM), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
30	Pelatihan digital marketing		Jl. K.H. Hasyim Ashari No 21, Kauman, Klojen, Kota Malang (IPNU), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
31	Pelatihan digital marketing		Jl. K.H. Hasyim Ashari No 21, Kauman, Klojen, Kota Malang (IPPNU), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
32	Pelatihan digital marketing		Jl. Danau Limboto, Keduyo, Mangliawan, Malang (MMBI), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
33	Pelatihan digital marketing		Kelurahan Kauman, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
34	Pelatihan digital marketing		Kelurahan Madyopuro, Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Kelurahan
35	Pelatihan digital marketing		Kelurahan Blimbing Jl. Tenaga Utara No. 1, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
36	Pelatihan digital marketing		kelurahan Bandulan, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan

## G.II-52

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume			Catatan	
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)		Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Pelatihan digital marketing		Aula Kelurahan Jodipan, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
38	Pelatihan digital marketing		Jl. sudimoro 17, Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Kelurahan
39	Pelatihan digital marketing		Karang Taruna, Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Kelurahan
40	Pelatihan digital marketing		Jl. Kol. Sugiono (Kartar 1), Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
41	Pelatihan digital marketing		Jl. Gajayana no 28 B ( Pemuda Muhammadiyah ), Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Tematik
42	Pelatihan digital marketing		kelurahan bumiayu, Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Kelurahan
43	Pelatihan digital marketing		Jl Kalisari RW.02, Kota Malang		1	orang	4,500,000	4,500,000	Usulan musrenbang Kelurahan
44	Pelatihan digital marketing		Jl. Raya Cemorokandang No.1, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
45	Pelatihan digital marketing		Budi Utomo No. 1, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
46	Pelatihan digital marketing		KELURAHAN SAMAAAN, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
47	Pelatihan digital marketing		Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang		2	orang	4,500,000	9,000,000	Usulan musrenbang Tematik
48	Pelatihan olahan pangan (Pastry/ Bakery dan Aneka Masakan)		Jl. KH. Hasyim Asyari 21 (fatayat), Kota Malang		3	orang	4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Tematik

## G.II-53

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume			Catatan	
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)		Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Pelatihan olahan pangan (Pastry/ Bakery dan Aneka Masakan)		RT03 RW10 Kel.Polowijen, Kota Malang		3	orang	4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
50	Pelatihan olahan pangan (Pastry/ Bakery dan Aneka Masakan)		Karangtaruna - Kelurahan Klojen, Kota Malang		3	orang	4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
51	Pelatihan olahan pangan (Pastry/ Bakery dan Aneka Masakan)		Jl. Sumba 12 Klojen Malang ( SRIKANDI PP), Kota Malang		3	orang	4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Tematik
52	Pelatihan olahan pangan (Pastry/ Bakery dan Aneka Masakan)		RW 12, Kota Malang		3	orang	4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
53	Pelatihan olahan pangan (Pastry/ Bakery dan Aneka Masakan)		Jl. Sidomulyo 2 No. 18 Rt 03 Rw 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang (Malang Hijau), Kota Malang		3	orang	4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Tematik
54	Pelatihan olahan pangan (Pastry/ Bakery dan Aneka Masakan)		Jl. Kebalen Wetan (Kantor Kel. Kotalama), Kota Malang		3	orang	4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Kelurahan
55	Pelatihan olahan pangan (Pastry/ Bakery dan Aneka Masakan)		Kecamatan Klojen, Kota Malang		2	orang	4,000,000	8,000,000	Usulan musrenbang Tematik
56	Pelatihan olahan pangan (Pastry/ Bakery dan Aneka Masakan)		Jl. KH. Hasyim Asyari 2, Kota Malang		3	orang	4,000,000	12,000,000	Usulan musrenbang Tematik
Total Usulan Musrenbang					103	Orang		440,500,000	

## G.II-54

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indika tor Kinerj a	Besaran/Volume			Catatan	
					Volu me	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)		Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
USULAN RESES/POKIR									
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
1	Pelatihan barista	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Selorejo RT.06 RW.07, Kota Malang		5	orang	4,000,000	20,000,000	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2	Pelatihan barista		Jl. KH. Hasyim Ashari VIB/75 RT.04 RW.05 Kel. Kauman Kota Malang		10	orang	4,000,000	40,000,000	FRAKSI PKB
3	Pelatihan barista		Jl. Kopral usman I/37 RT.04 RW. 05 Kel. Kauman Kota Malang		10	orang	4,000,000	40,000,000	FRAKSI PKB
4	Pelatihan barista		Jl. Simbar Menjangan RT.05 RW.03 Kel. Jatimulyo, Kota Malang		25	orang	4,000,000	100,000,000	FRAKSI GERINDRA
5	Pelatihan barista		Kecamatan Blimbing Kota Malang		5	orang	4,000,000	20,000,000	FRAKSI DAMAI
6	Pelatihan barista		Jl. Tenaga Utara I Kantor Kelurahan Blimbing, Kota Malang		10	orang	4,000,000	40,000,000	FRAKSI DAMAI

## G.II-55

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang		10	orang	4,500,000	45,000,000	FRAKSI PKS
8	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Permata Hijau RT.04 RW.09 Kelurahan Tlogomas Kota Malang		25	orang	4,500,000	112,500,000	FRAKSI GERINDRA
9	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Jl. Ade Irma Suryani GG.3, RW.06, Kota Malang		5	orang	4,500,000	22,500,000	FRAKSI GERINDRA
10	Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal		Kecamatan Blimbing Kota Malang		5	orang	4,500,000	22,500,000	FRAKSI DAMAI
11	Pelatihan digital marketing		Semua kecamatan Se-Kota Malang, Kota Malang		40	orang	4,500,000	180,000,000	FRAKSI PKS
12	Pelatihan digital marketing		Kota Malang, Kota Malang		10	orang	4,500,000	45,000,000	FRAKSI PKS
13	Pelatihan digital marketing		Jl. Tenes Meja RT.03 RW. 03 , Kota Malang		25	orang	4,500,000	112,500,000	FRAKSI GERINDRA
14	Pelatihan digital marketing		Jl. Bareng Kartini RW.01 Kelurahan Bareng , Klojen, Kota Malang		3	orang	4,500,000	13,500,000	FRAKSI GERINDRA
15	Pelatihan digital marketing		Jl. Ade Irma Suryani GG.3, RW.06, Kota Malang		5	orang	4,500,000	22,500,000	FRAKSI GERINDRA
16	Pelatihan digital marketing		Kecamatan Blimbing Kota Malang		5	orang	4,500,000	22,500,000	FRAKSI DAMAI
17	Pelatihan digital marketing		Karang Taruna RW.05 Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang		4	orang	4,500,000	18,000,000	FRAKSI GOLKAR NASDEM PSI

Ap  
P

## G.II-56

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Pelatihan olahan pangan (Pastry/Bakery dan Aneka Masakan)		Jl. Piranha Atas RT.5 RW.1, Kota Malang		20	orang	4,000,000	80,000,000	FRAKSI PDI PERJUANGAN
19	Pelatihan olahan pangan (Pastry/Bakery dan Aneka Masakan)		Jl. Letjen Sutoyo III Rt.1 RW.3, Kota Malang		3	orang	4,000,000	12,000,000	FRAKSI PDI PERJUANGAN
20	Pelatihan olahan pangan (Pastry/Bakery dan Aneka Masakan)		Jl. Ki ageng Gribik 4 (Kantor Muslimat NU Kedungkandang) Kec. Kedungkandang, Kota Malang		15	orang	4,000,000	60,000,000	FRAKSI PKB
21	Pelatihan olahan pangan (Pastry/Bakery dan Aneka Masakan)		1 orang tiap kelurahan, Kota Malang		11	orang	4,000,000	44,000,000	FRAKSI PKS
22	Pelatihan olahan pangan (Pastry/Bakery dan Aneka Masakan)		Jl. Kesumba Dalam RT.04 RW.03 Kelurahan Jatimulyo, Kota Malang		25	orang	4,000,000	100,000,000	FRAKSI GERINDRA
23	Pelatihan olahan pangan (Pastry/Bakery dan Aneka Masakan)		Jl. S. Supriadi RW.04 Kel. Sukun, Kota Malang		25	orang	4,000,000	100,000,000	FRAKSI GERINDRA
Total Usulan Pokir					301	Orang		1,272,500,000.00	

BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJMN antara Lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa, pelayanan barang dan/atau pelayanan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan SPM; dan
- b. Menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui 16 paket Kebijakan Ekonomi.

Sesuai dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih yaitu :

Visi : Kota malang BERMARTABAT

Yang berarti : “Manusia Paripurna, Terdidik dan Berkarakter- Kota yang Lembut & Tegas – Aman & Nyaman – Penuh Kesadaran yang Positif.

Misi :

1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya bagi semua warga;
2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan;
3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender;
4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagai salah satu pelaku pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ekonomi kreatif dan pelayanan publik sesuai dengan misi 2, 3 dan 4 Kota Malang yaitu :

Misi 2 (dua) : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan;

Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Tujuan : Terwujudnya Produktivitas dan Daya Saing Daerah yang merata dan berkelanjutan.

Misi 3 (tiga) : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender;

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial

Tujuan : Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang berpihak masyarakat rentan dan Gender

Misi 4 (empat) : Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif

Tujuan : Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum , Profesional dan Akuntabel

Berpedoman Visi dan Misi Walikota terpilih Tujuan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mempunyai tujuan :

“Terwujudnya Kualitas Tenaga Kerja yang berdaya saing, serta penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel”

Dengan indikator tujuan :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2. Predikat WBK

Sesuai dengan tujuan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mempunyai Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja yang Kompeten dan Nilai Penanaman Modal ;
2. Meningkatkan Penempatan Kerja dan Hubungan Industrial yang Kondusif;
3. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan ;
5. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai sasaran tersebut Dinas tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Promosi Penanaman Modal
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
7. Program Pengendalian Penanaman Modal
8. Program Pelayanan Penanaman Modal
9. Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
- d. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. Pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- g. Pengukuran produktivitas tenaga kerja;
- h. Pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja;
- i. Koordinasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan purna penempatan;

- j. Koordinasi pengawasan tenaga kerja asing;
- k. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;
- l. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah;
- m. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
- n. Penyusunan peta potensi investasi;
- o. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- p. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar;
- q. Pengendalian pelaksanaan tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- r. Pengelolaan data dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan yang terintegrasi;
- s. Pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
- t. Pengembangan sistem informasi dan pengolahan data tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- u. Pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- v. Pengawasan dan/atau penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan perizinan;
- w. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- x. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- y. Pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- z. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- aa. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Upaya pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kota Malang merupakan bagian penting dalam pembangunan di Kota Malang. Untuk menghadapi keterbukaan pasar global, menuntut peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan keahlian/kompetensi tenaga kerja berfungsi dengan sempurna dalam melakukan transaksi ketenagakerjaan. Dengan peningkatan kompetensi yang memadai, diharapkan terjadi penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dalam dunia kerja, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka di kota Malang. Disamping itu, upaya menciptakan hubungan industrial yang kondusif mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pekerja dan pengusaha memperoleh hak dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Pembangunan ketenagakerjaan yang komprehensif dan berkelanjutan di daerah membutuhkan sebuah perencanaan ketenagakerjaan sebagai informasi ketenagakerjaan dan upaya pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik.

Sedangkan ruang lingkup Penanaman Modal dan PTSP mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan Non perizinan di bidang penanaman modal melalui :

#### G.III-4

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pelayanan.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang operasional pelayanan dan fasilitas pelayanan.
3. Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal, terlaksananya koordinasi yang baik antar lembaga atau instansi dalam pengendalian pelaksanaan investasi dan perizinan.
4. Layanan Pengelolaan Pengaduan Penanaman Modal dan PTSP.
5. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal didukung *Online Single Submission (OSS)*. Pelaksanaan OSS mempunyai manfaat :
  - a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
  - b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
  - c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
  - d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)
6. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan  
Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal berbasis elektronik meliputi : potensi dan peluang penanaman modal, jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu pelayanan.

Menata kebijakan administrasi perizinan guna mendorong terakomodasinya hak – hak masyarakat dan meningkatkan kualitas dokumen, data dan informasi sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Koordinasi dengan dinas terkait dalam penerapan peraturan perundang – undangan maupun perda yang mendukung administrasi dan teknis perizinan;
2. Penyempurnaan sistem permohonan izin dan pengelolaan informasi perizinan melalui sistem administrasi komputerisasi berbasis On-line;
3. Penataan kelembagaan administrasi Investasi dan Perizinan yang berkelanjutan di daerah termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang Penanaman Modal/Investasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan.

#### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Penyusunan Renja adalah untuk :

- a. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 serta proyeksi tahun 2024;
- b. Untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
- c. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;

- d. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

### 3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Yang menjadi salah satu bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sasaran dalam pencapaian visi dan misi Walikota Malang. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Malang, maka sebelum melaksanakan perumusan atas program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, dirasakan perlu untuk memahami makna tujuan sasaran yang diinginkan. Transparansi pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah harus dilaksanakan. Salah satu implikasi dari tekad ini adalah kewajiban bagi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang untuk menjawab tantangan tersebut agar lebih transparan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik – baiknya. Harus diakui bahwa masyarakat menuntut agar pelayanan publik dapat ditingkatkan dan lebih transparan, sehingga Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang harus bekerja dengan lebih baik, lebih terbuka dan secara internal dapat membina aparatnya kearah yang lebih profesional, responsif, akuntabel, transparan dan demokratis. Tuntutan ini membawa implikasi yang sangat luas dalam memacu pengembangan karier aparat dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan keterbukaan dimana setiap Instansi Pemerintah Kota Malang dituntut mampu untuk melihat kebutuhan, potensi ekonomi daerah dan peluang dalam rangka mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan yang bersifat lokal dan regional. Hubungan yang semakin terbuka antara masyarakat dengan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini selain mempunyai peluang juga mengandung tantangan yang akan dihadapi. Berdasarkan hasil pertimbangan terhadap tujuan sasaran dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang menetapkan beberapa Program dan Kegiatan.

- b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran, maka perlu ditetapkan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Kegiatan yang sedang berjalan yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra serta program dan kegiatan alternatif merupakan program dan kegiatan yang perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam mendukung capaian tujuan dan sasaran pada tahun 2023 ada 9 (sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan lokasi pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan

G.III-6

Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Untuk penganggaran program kegiatan berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu APBD Kota Malang, DAK dan DBHCHT dengan pagu indikatif sebesar Rp. 22.821.697.649- (Dua puluh dua milyar delapan ratus dua puluh satu enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai berikut:

1. Untuk anggaran yang bersumber dari APBD kota Malang adalah :
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 19.364.532.215,-
  - b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp.1.811.850.000,-
  - c) Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 52.210.000,-
  - d) Program Hubungan Industrial sebesar Rp. 246.850.000,-
  - e) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp.8.990.000,-
  - f) Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp. 48.990.000,-
  - g) Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp. 964.039.776,-
  - h) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp.146.555.000,-
  - i) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp. 177.680.558,-
2. Anggaran yang bersumber dari DBHCHT dan DAK Kota Malang Tahun 2023 menunggu penetapan dari TAPD.

fa

G.IV-1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang akan menjelaskan tentang program, kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif Tahun 2023 yang akan tersaji dalam rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 sesuai tabel T.C – 33 sebagai berikut :



G.IV-2  
TABEL 4.1 (T.C-33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN  
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22,821,697,649						27,481,492,835
				2.07	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA			21,475,442,315						21,428,259,835
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	81.85					19,364,532,215						21,428,259,835
				2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	11,192,850,526					100%	15,490,459,835
				2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat	100%	116,420,000	PAD		Kota Malang		100%	485,815,000

10/10

## G.IV-3

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Daerah yang disusun sesuai ketentuan								
				2.07.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	12,000,000	PAD	Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		11 dokumen	127,050,000
				2.07.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 laporan	10,000,000	PAD	Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		22 laporan	12,100,000
				2.07.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	94,420,000	PAD	Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		4 laporan	346,665,000
				2.07.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	11,076,430,526	PAD				100%	15,004,644,835
				2.07.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan	11,048,235,526	PAD,D AU	ASN dan Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		72 Orang/Bulan	14,859,444,835

of

## G.IV-4

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.07.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	28,195,000	PAD	ASN dan Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		5 Laporan	145,200,000.00
						Nilai Survey Kepuasan Internal	80	1,946,827,581					80	1,542,225,000
				2.07.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	197,700,000	PAD				100%	252,500,000
				2.07.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 orang	197,700,000	PAD	Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		65 orang	223,500,000
				2.07.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80%	643,954,960	PAD		Kota Malang		80%	836,700,000
				2.07.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	25,892,540	PAD	Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		1 paket	20,000,000
				2.07.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	196,839,520	PAD	ASN, penerima layanan dan	Kota Malang		4 paket	199,500,000

## G.IV-5

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Kantor yang Disediakan				Disnaker, PMPTSP				
				2.07.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	196,812,900	PAD	ASN, penerima layanan dan Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		1 paket	199,500,000
				2.07.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	8,590,000	PAD	ASN, penerima layanan dan Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		2 dokumen	30,000,000
				2.07.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 laporan	211,220,000	PAD	ASN, penerima layanan dan Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		86 laporan	360,750,000
				2.07.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	4,600,000	PAD	ASN, penerima layanan dan Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		1 dokumen	26,950,000
				2.07.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	1,105,172,621	PAD				100%	453,025,000
				2.07.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	576,139,760	PAD	Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		24 laporan	304,525,000

## G.IV-6

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	529,032,861	PAD	Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		2 laporan	148,500,000
						Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	6,224,854,108					80%	4,395,575,000
				2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	80%	3,275,000	PAD				80%	8,500,000
				2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	3,275,000	PAD	BMD Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		4 laporan	8,500,000
				2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	275,732,000	PAD				100%	1,115,575,000
				2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	275,732,000	PAD	Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		8 unit	1,115,575,000
				2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%	5,945,847,108	PAD				80%	3,271,500,000

## G.IV-7

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pemerintahan Daerah									
				2.07.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	558,523,024	PAD	Gedung kantor, kendaraan Dinas dan sarana prasarana Disnaker, P MPTSP	Kota Malang		41 unit	571,500,000
				2.07.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5,340,772,084	PAD	Gedung kantor, kendaraan Dinas dan sarana prasarana Disnaker, P MPTSP	Kota Malang		1 unit	2,500,000,000
				2.07.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	124 unit	46,552,000	PAD	Gedung kantor, kendaraan Dinas dan sarana prasarana Disnaker, P MPTSP	Kota Malang		124 unit	200,000,000

## G.IV-8

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	1. Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah pekerja/buruh di perusahaan swasta/PMA/PMDN dibagi Jumlah perusahaan swasta/PMA/PMDN	73					1,811,850,000						2,585,000,000
				2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1%	1,722,280,000						825,000,000
				2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pengangguran yang dilatih	404 orang	1,722,280,000	PAD				404 orang	825,000,000
				2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	103 orang	1,722,280,000	PAD	Masyarakat pencari kerja Kota Malang	Kota Malang		103 orang	825,000,000
						Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	70%	89,570,000						110,000,000
				2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang memiliki perizinan	35 Lembaga	89,570,000	PAD				35 lembaga	110,000,000



## G.IV-9

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.07.03.2.0 2.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	35 Lembaga	89,570,000	PAD	LPK Swasta dan BLKLN	Kota Malang		35 Lembaga	110,000,000
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	Jumlah penduduk yang bekerja dibagi Jumlah angkatan kerja dikali 100%	94.40 %					299,060,100						342,000,000
				2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	78%	52,210,000					78%	72,600,000
				2.07.04.2.0 1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	34 BKK	52,210,000	PAD				34 BKK	60,500,000
				2.07.04.2.0 1.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 orang	52,210,000	PAD	Alumni SMK dan BKK	Kota Malang		50 orang	60,500,000
				2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11.3%	246,850,100					11.30%	281,500,000

## G.IV-10

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	70%	246,850,100	PAD				70%	281,500,000
				2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	24 perkara	93,850,000	PAD	Pengusaha, Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha & Pekerja	Kota Malang		24 perkara	120,000,000
				2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	153,000,100	PAD	Pengusaha, Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha & Pekerja	Kota Malang		1 lembaga	161,500,000
				2.18	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL			1,346,255,334						4,764,133,000

10/1

## G.IV-11

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Jumlah nilai investasi tahun n dikurangi Jumlah nilai investasi tahun n-1 dibagi Jumlah nilai investasi tahun n-1 dikali 100 %	4.0%					57,980,000						847,000,000
				2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Penanaman Modal	80%	8,990,000					80%	363,000,000
				2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	1 dokumen	8,990,000	PAD				1 dokumen	363,000,000
				2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	8,990,000	PAD	Pelaku usaha	Kota Malang		1 dokumen	363,000,000

## G.IV-12

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	60%	48,990,000					60%	484,000,000
				2.18.03.2.01	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 kali	48,990,000	PAD				1 kali	484,000,000
				2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	48,990,000	PAD	Pelaku usaha	Kota Malang		1 dokumen	484,000,000
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	Nilai SKM	89					964,039,776						2,238,610,000
				2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-Persentase penerbitan ijin dan non ijin Pekerjaan Umum -Persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi,	90%	964,039,776					90%	2,238,610,000
							90%						90%	

## G.IV-13

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						pariwisata dan sosial budaya -Persentase realisasi target retribusi IMB	100%						100%	
				2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum Sesuai Standar -Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Sesuai Standar -Persentase IMB yang terbit -Persentase pengaduan yang diselesaikan	5000 Izin  6000 izin  80% 100%	964,039,776	PAD				5000 Izin  6000 izin  80% 100%	2,238,610,000
				2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	11000 pelaku usaha	959,899,776	PAD	1. 128 jenis izin 2. Masyarakat yang mengadakan permasalahan ke Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		11.000 pelaku usaha	1,390,400,000

## G.IV-14

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Secara Elektronik								
				2.18.04.2.0 1.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 kegiatan usaha	2,070,000	PAD	1. 128 jenis izin 2. Masyarakat yang mengadakan permasalahan ke Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		300 kegiatan usaha	726,000,000
				2.18.04.2.0 1.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 orang	2,070,000	PAD	1. 128 jenis izin 2. Masyarakat yang mengadakan permasalahan ke Disnaker, PMPTSP	Kota Malang		50 orang	122,210,000
Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	Nilai Indeks SPBE	4.5					324,235,558						1,575,673,000

## G.IV-15

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80%	146,555,000					80%	1,532,223,000
				2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	23 perusahaan	146,555,000	PAD				23 perusahaan	1,532,223,000
				2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 kegiatan usaha	4,000,000	PAD	1. Pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM Online 2. Pelaku Usaha yang sudah atau belum memenuhi komitmen yang ada di NIB 3. Pelaku usaha yang sudah menerima layanan perizinan dan nonperizinan	Kota Malang		50 kegiatan usaha	102,850,000

## G.IV-16

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.18.05.2.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	140 pelaku usaha	96,555,000	PAD	1. Pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM Online 2. Pelaku Usaha yang sudah atau belum memenuhi komitmen yang ada di NIB 3. Pelaku usaha yang sudah menerima layanan perizinan dan nonperizinan	Kota Malang		140 pelaku usaha	551,760,000
				2.18.05.2.0 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	140 kegiatan usaha	46,000,000	PAD	1. Pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM Online 2. Pelaku Usaha yang sudah atau belum memenuhi komitmen yang ada di NIB	Kota Malang		140 kegiatan usaha	877,613,000

## G.IV-17

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target 2023	Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2024	
							Keluaran	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										3. Pelaku usaha yang sudah menerima layanan perizinan dan nonperizinan				
				2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100%	177,680,558					100%	146,300,000
				2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	80%	177,680,558	PAD				80%	146,300,000
				2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 dokumen	177,680,558	PAD	Data Perizinan, Non Perizinan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Kota Malang		1 dokumen	146,300,000
TOTAL								22.821.697.649						27.481.492.835

G.IV-18

TABEL 4.2

## PEMETAAN SUB KEGIATAN SESUAI KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	X.XX.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/RKT	2	dokumen	X.XX.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen
			Jumlah dokumen Renstra	1	dokumen					
2	X.XX.01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3	dokumen	X.XX.01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22	Laporan
3	X.XX.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah sertifikasi	1	sertifikasi	X.XX.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan
			Jumlah dokumen standar pelayanan							
			Jumlah ZI	1	dokumen					
			Jumlah dokumen SKM	2	dokumen					
4	X.XX.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	70	orang	X.XX.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	72	Orang/ Bulan

## G.IV-19

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	5	laporan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan
6	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	4	laporan	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan
7	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	0		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket
8	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	65	orang	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65	Orang
9	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10	jenis	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket
10	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	33	jenis	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket
11	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10	jenis	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket

## G.IV-20

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	720	eks	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen
			Jumlah peraturan perundang-undangan	2	dokumen					
13	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman	3000	kotak	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86	Laporan
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	26	kali					
14	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	13900	berkas	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen
15	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1	jenis	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	Unit
16	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	24	bulan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan
17	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	750	m2	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan

## G.IV-21

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Luasan ruangan yang dibersihkan	5600	m2					
			Jumlah bahan dan alat	17	jenis					
18	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	45	Unit	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	Unit
			Jumlah volume BBM dan pelumas	22400	liter					
19	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	750	m2	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
			Rehabilitasi MPP	0						
			Jumlah dokumen revisi DED MPP	0						
20	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5	jenis	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	124	Unit

## G.IV-22

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	2.07.03.2.01.0 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas	107	orang	2.07.03.2.01.0 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	103	Orang
22	2.07.03.2.02.0 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mengikuti Bimtek	35	LPKS	2.07.03.2.02.0 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	35	Lembaga
23	2.07.04.2.01.0 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus	50	Orang	2.07.04.2.01.0 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50	Orang
24	2.07.04.2.03.0 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair	0	Perusahaan	2.07.04.2.03.0 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0	Orang
25	2.07.04.2.04.0 1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah peserta Sosialisasi Perlindungan PMI dan PPTKIS	0	Orang	2.07.04.2.04.0 1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0	Orang

## G.IV-23

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	2.07.05.2.01.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah peserta bimtek	0	Orang	2.07.05.2.01.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	0	Perusahaan
27	2.07.05.2.01.0 2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah peserta bimtek	0	Orang	2.07.05.2.01.0 2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0	Perusahaan
28	2.07.05.2.01.0 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah peserta bimtek	0	Orang	2.07.05.2.01.0 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	0	Laporan
29	2.07.05.2.02.0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	100	Orang	2.07.05.2.02.0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	24	Perkara
			Jumlah dokumen Usulan UMK	1	Dokumen					
			Jumlah peserta sosialisasi	100	Orang					

## G.IV-24

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah peserta bimtek	0		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0	Asosiasi dan Serikat Pekerja
31	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil LKS Tripartit	3	Dokumen	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga
32	2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta bimbingan teknis	0		2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0	Orang
33	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah perda/perwal yang disusun	1	dokumen	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen
34	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah keikutsertaan dalam gelar pameran investasi	0	kali	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen
			Jumlah profil yang disusun	0	dokumen					

Op

## G.IV-25

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	20	pelaku usaha					
35	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perizinan dan non perizinan Pekerjaan Umum yang diterbitkan	5000	izin	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11.000	Pelaku usaha
			Jumlah perizinan dan non perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya yang diterbitkan	6000	izin					
36	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pengajuan ijin yang ditinjau	300	berkas	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300	Kegiatan usaha

## G.IV-26

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan yang ditangani	50	pengaduan	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50	Orang
38	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Profil hasil pemantauan LKPM	10	proyek	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50	Kegiatan usaha
39	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta bimbingan teknis/sosialisasi	140	orang	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	140	Pelaku usaha
40	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal	10	kali	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	140	Kegiatan usaha

Ap  
Or

## G.IV-27

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Profil hasil pengawasan dan BAP	140	proyek					
41	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fitur	7	fitur	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen
			Jumlah data yang diolah	20000	data					

sp/ct

BAB V  
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2018-2023 dalam menunjang Visi dan Misi Kota Malang sesuai dengan target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Malang. Kaidah-kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yaitu:

1. Bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, agar segera menyusun rencana kerja masing – masing dengan mengacu pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
3. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2023 secara murni dan konsekuen.
4. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Kota Malang.

Pada akhirnya seluruh kelengkapan dokumen yang termuat dalam Rencana Kerja tahun 2023 ini selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, juga diharapkan dapatnya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang untuk mengambil keputusan.

fca